



PEMULIHAN SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT TERDAMPAK TSUNAMI DI KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

SOCIAL AND ECONOMIC RECOVERY POST TSUNAMI IN PANDEGLANG DISTRICT TO SUPPORT SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Dedy Hartono^{1*}, Syamsul Maarif¹, Deffi Ayu Puspito Sari², W Wilopo¹

¹ Universitas Pertahanan RI, Bogor, Indonesia

² Universitas Bakrie, Jakarta, Indonesia

Sejarah Artikel

Diterima: Februari 2022

Disetujui: April 2022

Dipublikasikan: Mei
2022

Abstract

Post-disaster recovery had to be measured to determine the level of success of the recovery process whether it has returned to pre-disaster condition or conditions that are better than before the disaster or even worse than before the disaster. This study aimed to analyze the social and economic recovery of disaster-affected communities in order to support sustainable regional programs. This study used qualitative research method with a case study research design. The results of the study showed that social recovery in 3 years after the Tsunami, namely in 2021, is 100.08% with the indicator of recovered. Meanwhile, the economic recovery up to 3 years after the Tsunami, namely in 2021, at 99.59% has not yet reached the recovery indicator. The recovered category is based on the calculation results with numbers above 100%. The conclusion of this research was that the effective social and economic recovery will support sustainable regional development because community resilience will be formed. The process of social and economic recovery, the current social condition of the community has recovered on average and the economic condition of the community is nearing recovery, with minimal central government programs. This was due to the resilience of local governments and communities. A strong social and economic community will support the creation of the principle of "build back better and safer", so that people's lives will be better and safer than before the disaster occurred.

Kata Kunci

Pemulihan Sosial;
Pemulihan ekonomi;
Pembangunan
Berkelanjutan; Tsunami
Pandeglang

Abstrak

Pemulihan pascabencana harus diukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pemulihan, apakah sudah mengembalikan seluruh aspek ke kondisi semula atau kondisi yang lebih baik dari sebelum bencana atau malah menjadi lebih buruk dari sebelum bencana. Penelitian ini bertujuan membahas pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana guna mendukung program



daerah berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan pemulihan sosial 3 tahun pasca Tsunami yaitu tahun 2021 sebesar 100,08 % dengan indikator sudah pulih. Sedangkan pemulihan ekonomi sampai 3 tahun pasca Tsunami yaitu tahun 2021 sebesar 99.59 % belum mencapai indikator pulih. Kategori pulih berdasarkan hasil perhitungan yang dengan angka di atas 100%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemulihan sosial dan ekonomi yang efektif akan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dikarenakan ketangguhan masyarakat akan terbentuk. Proses pemulihan sosial dan ekonomi, kondisi sosial masyarakat saat ini secara nilai rata sudah pulih dan kondisi ekonomi masyarakat mendekati pulih, dengan program pemerintah pusat yang minim. Hal ini disebabkan oleh ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat. Sosial dan ekonomi masyarakat yang kuat akan mendukung terciptanya prinsip "*build back better and safer*", sehingga kehidupan masyarakat akan lebih baik dan aman dibandingkan sebelum bencana terjadi.

DOI:
10.33172/jmb.v8i1.1209

e-ISSN: 2716-4462
© 2022 Published by Program Studi Manajemen Bencana
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

***Corresponding Author:**

Dedy Hartono
Email: dedyhartonoaal50@gmail.com



PENDAHULUAN

Bencana alam tsunami yang terjadi di Selat Sunda dengan wilayah terdampak bencana 2 (dua) provinsi yakni Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang) serta Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus). Bencana tsunami pada 22 Desember 2018, dipicu oleh material longsoran lereng seluas 64 hektar sepanjang 312,78 km dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang masuk ke Selat Sunda dengan kedalaman 0,08 km intensitas 255 milimeter kubik, pada pukul 20.56 WIB saat air laut pasang (Alimsuardi et al., 2019; Ardinata et al., 2022). Wilayah yang terdampak paling parah akibat tsunami pada pulau Jawa adalah Kabupaten Pandeglang Banten.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga 31 Desember 2018 jumlah korban meninggal dunia akibat tsunami Selat Sunda berjumlah 437 orang (BPBD Kabupaten Pandeglang, 2021). Ketiadaan peringatan dini membuat masyarakat tidak

memiliki waktu untuk menyelamatkan diri dan harta benda ke lokasi yang aman. Dari lima kabupaten, daerah paling parah terdampak tsunami adalah Kabupaten Pandeglang. Tercatat, korban meninggal dunia di Kabupaten Pandeglang paling banyak, yaitu sebanyak 296 orang. Selain korban meninggal, tercatat 14.059 orang luka-luka, 16 orang hilang, dan 33.721 mengungsi. BNPB juga mencatat, akibat tsunami yang terjadi sebanyak 2.752 rumah, 92 penginapan dan warung, 510 perahu dan kapal, serta 147 kendaraan rusak. Melihat dampak tsunami paling parah di Kabupaten Pandeglang ini, BNPB menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung sejak 22 Desember 2018 sampai dengan 4 Januari 2019.

Prioritas pemulihan pascabencana yang dilakukan pemerintah sendiri lebih difokuskan kepada sektor permukiman karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan pada sektor sosial dan ekonomi kurang mendapat perhatian (Alexander, 2002; Syarifah et al., 2020; Utama et al., 2020). Upaya pengurangan risiko bencana, faktor sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya merupakan komponen dari kerentanan (V). Semakin kecil kerentanan, maka semakin kecil risiko yang dihadapi. Pascabencana tsunami, selain pemulihan sektor perumahan, pemulihan sosial dan ekonomi, juga merupakan variabel yang penting untuk mendukung program pembangunan daerah berkelanjutan. Pembangunan di tiap daerah merupakan perwujudan pembangunan nasional, yang kegiatannya membutuhkan anggaran belanja daerah, salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari kegiatan perekonomian daerah tersebut, sehingga pemulihan sosial dan ekonomi menjadi hal yang penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya pemulihan diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, indikator yang seharusnya tercapai adalah meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat korban bencana. Akan tetapi, kondisi saat ini pemulihan ekonomi masyarakat sedang terkendala COVID-19 yang menyebabkan ditutupnya kawasan sektor pariwisata di Kabupaten Pandeglang pada saat dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Permasalahan ini tentunya menjadi kendala tersendiri dalam pemulihan ekonomi pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang, sehingga diperlukan upaya baru dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini.

Pemulihan pascabencana harus diukur untuk mengevaluasi kinerja kegiatan yang telah atau sedang dijalankan sehingga dapat memberikan masukan kepada perumusan strategi program/ kegiatan berikutnya (BNPB, 2019; Putri et al., 2020). Pemulihan pascabencana harus diukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pemulihan, sudah mengembalikan seluruh aspek ke kondisi semula atau kondisi yang lebih baik dari sebelum bencana atau malah menjadi lebih buruk dari sebelum bencana. Pemulihan pascabencana yang efektif dan optimal akan mendukung program pembangunan daerah berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang dan menganalisis proses pemulihan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pandeglang guna mendukung program pembangunan berkelanjutan.

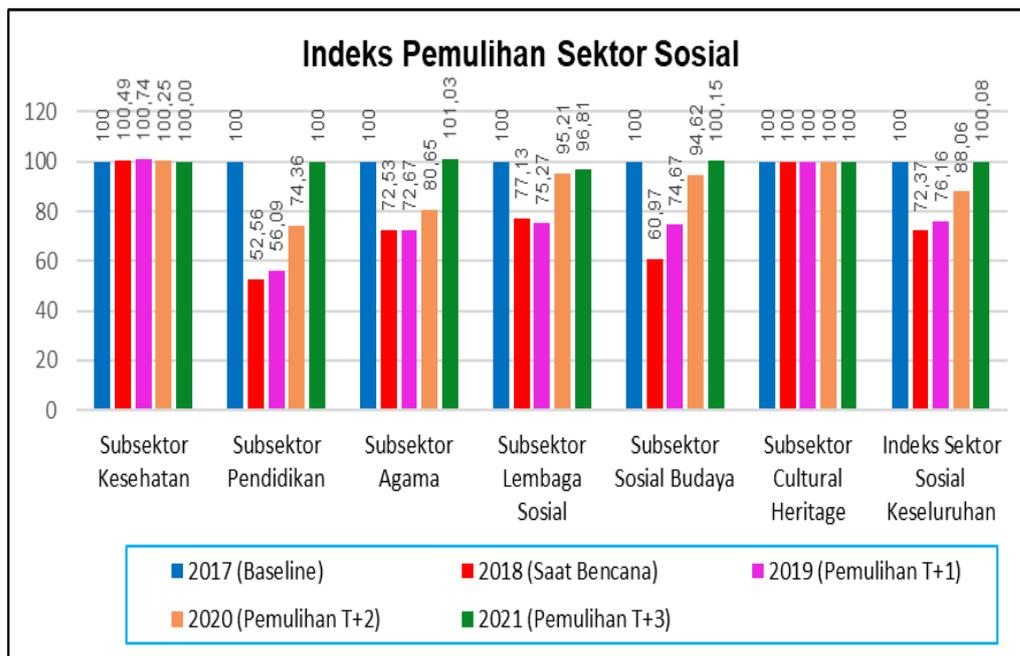
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi, memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan desain penelitian studi kasus memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi dan kondisi masyarakat tertentu. Untuk menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari narasumber yang kredibel terkait dengan pemulihan pascabencana. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan narasumber berdasarkan ciri atau karakteristik yang menggambarkan ciri pokok populasi (Arikunto, 2010; Adri et al., 2020; Bastian et al., 2021; Priambodo et al., 2020). Subyek dalam penelitian ini berasal dari BNPB, BPBD Kabupaten Pandeglang, instansi pemerintahan di Kabupaten Pandeglang, dan masyarakat terdampak bencana tsunami. Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data-data yang telah dikumpulkan diuji kredibilitasnya dengan teknik triangulasi sumber data. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisa data menurut Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemulihan Sosial Masyarakat Terdampak Bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang

Indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat pemulihan sosial masyarakat terdampak bencana pasca tsunami di Kabupaten Pandeglang tahun 2018 adalah 6 subsektor, yaitu subsektor kesehatan, subsektor pendidikan, subsektor agama, subsektor Lembaga sosial, subsektor sosial budaya dan subsektor *cultural heritage*. Dalam perhitungan tingkat pemulihan ekonomi pascabencana tsunami, peneliti menggunakan *tools* indeks pemulihan pascabencana yang dikeluarkan oleh BNPB. Dari hasil perhitungan menggunakan *tools* tersebut status *baseline* (kondisi atau tahun sebelum terjadinya bencana/ 2017) pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pascabencana tsunami tahun 2018 di kabupaten Pandeglang, maka dapat diinterpretasikan bahwa status pemulihan sektor ekonomi pada tahun 2018 sebesar 62,92% dengan kategori belum pulih, 2019 sebesar 70,32% dengan kategori belum pulih, 2020 sebesar 88,57% dengan kategori belum pulih, dan 2021 sebesar 99,59% dengan kategori belum pulih. Berdasarkan data tersebut, maka pada sektor ekonomi pada tahun 2021 kurang -0,41% untuk mencapai kategori pulih. Indeks pemulihan sosial masyarakat secara keseluruhan, dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Indeks Pemulihan Sektor Sosial

Pada subsektor kesehatan, bencana tsunami yang terjadi tahun 2018 lalu tidak berdampak pada kerusakan infrastruktur. Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin berasal dari BPJS kabupaten yang dikoordinir oleh desa. Terkadang meski sudah memiliki jaminan kesehatan tetapi tidak bisa digunakan

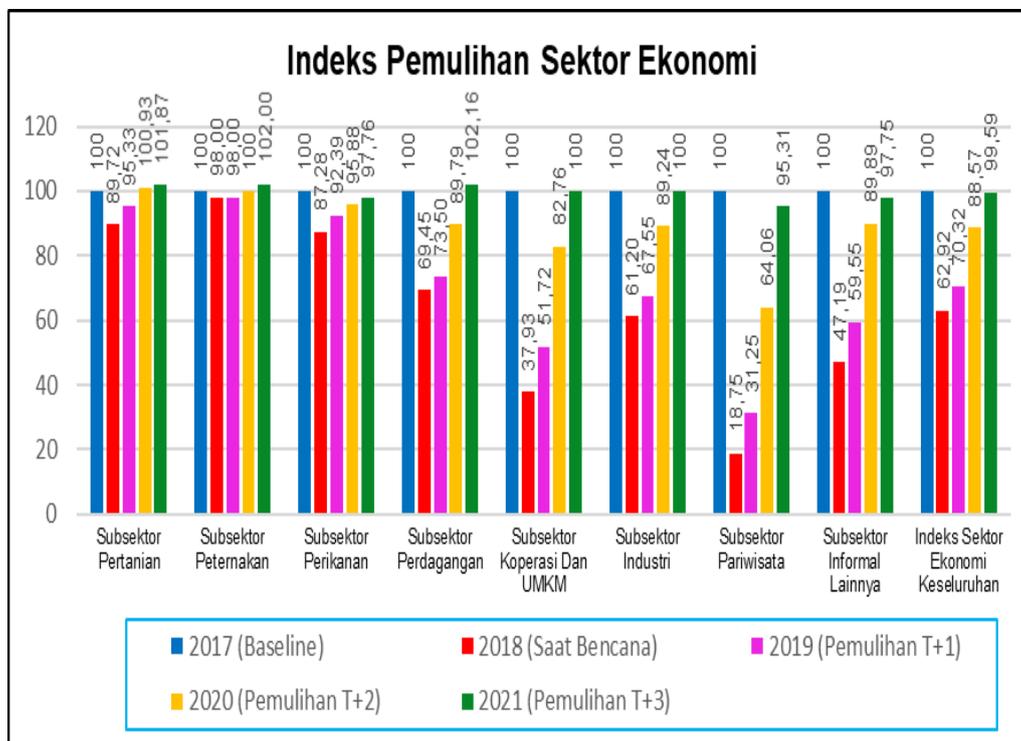
berobat, hal ini ada kemungkinan adanya perbedaan data, NIK masyarakat yang dimasukkan ke KIS berbeda dengan data NIK KTP saat ini. Saat ini ada program EKTP, sehingga banyak data NIK yang berubah. Hal ini juga bisa dikarenakan data sosial yang berada pada kementerian sosial masih menggunakan data lama 2015. Hal ini diartikan bahwa permasalahan BPJS sudah ada meskipun tsunami tidak terjadi, penyelesaiannya yaitu dengan pemutakhiran data oleh dinas sosial. Jaminan kesehatan sendiri merupakan salah satu *risk transfer* dalam pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerentanan yang dimiliki masyarakat.

Pada subsektor Pendidikan terdapat 2 sekolah yang rusak terkena tsunami dan sudah dibangun lagi. Bangunan dan fasilitas pendukung pendidikan sudah kembali normal sejak 2020, namun kegiatan pendidikan masih belum berjalan dengan normal karena adanya bencana non alam yaitu Pandemi COVID-19, sehingga masih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh secara daring. Kegiatan pemulihan pada subsektor agama hasil wawancara dengan tokoh agama islam dan masyarakat terdampak bencana, mayoritas masyarakat menyampaikan bahwa sarana tempat ibadah yang berada di Huntap baru selesai pembangunan pada tahun 2021, sehingga kegiatan agama di mushola masih baru mulai berjalan, tetapi kegiatan keagamaan masyarakat sudah berjalan secara mandiri sebelum adanya pembangunan mushola maupun dukungan dari pemerintah, melalui pengajian mandiri, maupun pada kampung tetangga sehingga kegiatan agama sudah kembali pulih.

Pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang harus dilakukan sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana di masa yang akan datang. Selain itu, kerugian dan kerusakan sektor sosial juga akan menciptakan risiko bencana yang baru jika tidak ditangani dengan efektif. Dalam konsep dasar risiko bencana dijelaskan bahwa bencana sosial merupakan salah satu jenis bahaya (*hazard*). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketidakberfungsian sosial masyarakat akan berdampak pada munculnya risiko baru seperti gesekan sosial antara masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bencana itu sendiri. Subsektor dengan proses pemulihan yang relatif lama adalah subsektor kelembagaan sosial dan sosial budaya. Setelah terjadi tsunami, masyarakat direlokasi pada huntap, sehingga menggabungkan dua daerah atau dua desa atau beberapa desa yang memiliki budaya daerah yang berbeda, paling tidak adalah ketika sebelum tsunami memiliki pemimpin yang berbeda.

Tingkat Pemulihan Ekonomi Masyarakat Terdampak Bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat pemulihan sosial masyarakat terdampak bencana pasca tsunami di Kabupaten Pandeglang tahun 2018 adalah 8 subsektor, yaitu subsektor pertanian, subsektor peternakan, subsektor perikanan, subsektor perdagangan, subsektor industri dan subsektor pariwisata, serta subsektor informal lainnya. Dalam perhitungan tingkat pemulihan ekonomi pascabencana tsunami, peneliti menggunakan *tools* indeks pemulihan pascabencana yang dikeluarkan oleh BNPB. Dari hasil perhitungan menggunakan *tools* tersebut status pemulihan sosial kemasyarakatan pasca Tsunami 2018 di kabupaten Pandeglang saat *baseline* (kondisi tahun sebelum terjadinya bencana/ tahun 2017) adalah 100%, maka status pemulihan pada tahun 2018 saat terjadinya bencana tsunami adalah 72,37% yang masuk dalam kategori belum pulih. Tahun 2019 sebesar 76,16% ada kenaikan pemulihan namun masih dalam kategori belum pulih. Tahun kedua pasca tsunami yaitu tahun 2020 sebesar 88,06% ada kenaikan namun juga masih dalam kategori belum pulih, dan akhirnya setelah tahun ketiga 2021 ada kenaikan signifikan mencapai indeks 100,08 dengan kategori pulih. Indeks pemulihan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Indeks Pemulihan Sektor Ekonomi

Subsektor yang cepat pulih yaitu pada subsektor pertanian dan peternakan. Subsektor pertanian pada tahun 2020 sudah pulih dikarenakan luas lahan yang terdampak tsunami tidak terlalu besar, dan untuk pemulihannya hanya dengan penanaman kembali tanaman yang rusak terkena tsunami. Sedangkan kerusakan terbesar pada sektor pertanian merupakan peralatan untuk meningkatkan hasil pertanian. Subsektor yang belum kembali yaitu pada subsektor perikanan, pariwisata, informal. Penyebab salah satunya dapat dikarenakan kurangnya intervensi pemulihan ekonomi dari pemerintah pusat dalam hal ini BNPB. Kegiatan pemulihan sosial ekonomi berdasarkan dokumen Rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami (R3PB) yang mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat hanya difokuskan pemulihan ekonomi masyarakat yaitu pada subsektor pertanian dan perikanan, tetapi sampai dengan saat ini belum dilaksanakan.

Pada subsektor Pariwisata untuk kegiatan pemulihannya terkendala jumlah wisatawan yang masih kurang sehingga mempengaruhi nilai indikator, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan pekerja. Wisatawan yang masih kurang penyebabnya adalah adanya trauma atau kekhawatiran para wisatawan akan adanya bencana tsunami kembali sehingga diperlukan suatu *trauma healing* berupa informasi yang baik dan promosi-promosi yang menarik dibidang pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang telah mengadakan promosi-promosi menarik untuk mengembalikan keyakinan para wisatawan melalui tagar Selat sunda aman, Promosi bahwa Pandeglang layak kunjung dengan mengadakan berbagai event seperti Culture Festival, Festival Tanjung lesung, dan Festival Carita. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat peningkatan tingkat pemulihan pada sektor ekonomi di setiap tahun meski tidak terlalu signifikan dan belum mencapai kategori pulih. Hal tersebut diperparah dengan adanya COVID-19 di mana pemerintah pusat mengatur pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Proses Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pandeglang Guna Mendukung Program Pembangunan Berkelanjutan

Dalam Kerangka Kerja Sendai, pemulihan sektor sosial pascabencana harus memahami risiko bencana melalui kebijakan berdasarkan pemahaman terkait kerentanan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan serta meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “membangun kembali dengan lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kabupaten Pandeglang sendiri dilakukan dengan 3 strategi utama yaitu revolusi mental dalam sistem pendidikan, revolusi mental dalam tata

kelola pemerintahan, revolusi mental dalam sistem sosial (diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama, dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas). Pada strategi pertama, revolusi mental dalam sistem pendidikan dimulai dengan pendidikan karakter. Selain itu, revolusi mental dalam sistem pendidikan juga harus memasukkan nilai-nilai kebencanaan. Akan tetapi hingga sampai penelitian ini dibuat, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) belum dilakukan secara optimal di Kabupaten Pandeglang.

Strategi kedua, yaitu revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan. Kendala yang paling signifikan dalam tata kelola pemerintahan adalah korupsi dana bantuan bencana dan dana bantuan sosial. Korupsi terjadi dalam proyek pembangunan infrastruktur kesiapsiagaan bencana (*shelter*) tsunami di Kabupaten Pandeglang. Kasus senilai Rp18 miliar dari anggaran APBN 2014, dengan dua tersangka yaitu Direktur PT Tidar Sejahtera Takwin Ali Muchtar dan PPK dari Kementerian Pekerjaan Umum. Bangunan *shelter* tersebut kini mangkrak dan kumuh serta kerap jadi tempat untuk berbuat asusila.

Strategi ketiga adalah revolusi mental dalam sistem sosial (diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama, dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas). Kabupaten Pandeglang mempunyai kearifan lokal, yaitu tradisi Ruwat Laut dan Khaul Ngalembak di Kecamatan Labuan dan Carita pada prinsipnya adalah merupakan wujud ekspresi wujud syukur masyarakat terhadap Sang Maha Pemberi Kehidupan. Tradisi Ruwatan Laut dan Khaul Ngalembak pada masyarakat Labuan dan Carita dapat digunakan sebagai media sosialisasi mitigasi bencana. Saat ini, berdasarkan hasil wawancara dan survey lapangan, revolusi mental dalam sistem sosial belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan penelitian bahwa Kabupaten Pandeglang masih ditemukan masalah-masalah kesejahteraan sosial, dengan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang masih tinggi. Saat ini, penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya pun masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan yang tidak terdata dengan baik, data pada kementerian sosial merupakan data tahun 2015 yang menyebabkan penentuan target program-program kesejahteraan sosial menjadi sulit. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 bervariasi, pada tahun 2017 sebesar 117.310 jiwa; tahun 2018 sebesar 116.160 jiwa, tahun 2019 sebesar 114.090 jiwa, tahun 2020 sebesar 120.440 jiwa (BPS Pandeglang, 2020). Sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

Untuk memastikan terjadinya pemulihan pascabencana yang efektif dan berkelanjutan, kerangka kerja rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang, sebaiknya berpedoman pada *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR). Pertama adalah memahami risiko bencana, di mana saat ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang sedang melakukan upaya memetakan kembali zonasi ancaman tsunami di Kabupaten Pandeglang. Hasil pemetaan tersebut, dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Kajian tersebut juga harus dijadikan dasar review rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang (saat ini sudah ada Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031). Dari segi ancaman, bencana tsunami memang relatif jarang terjadi dibandingkan bencana lainnya, namun apabila terjadi maka memberikan dampak yang luar biasa dari segi korban jiwa, kerusakan dan kerugian berbagai sektor. Oleh karena itu, perlu dibangun tanda atau simbol secara spasial di wilayah terdampak tsunami serta masyarakat diajarkan secara turun menurun cerita maupun literasi mengenai tsunami di wilayah terdampak tersebut. Hal ini penting untuk membangun kesadaran spasial dan budaya sadar bencana.

Kedua adalah memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana. Kabupaten Pandeglang belum mempunyai dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) terbaru yang dapat digunakan untuk integrasi pengurangan risiko bencana di semua sektor. Saat ini Kabupaten Pandeglang baru mempunyai Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031. Ketiga adalah investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Investasi dalam pengurangan risiko bencana dapat dilakukan salah satunya melalui *risk transfer* dengan menggunakan program BPJS. Akan tetapi, menurut masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini banyak masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas tersebut. Bahkan terdapat beberapa kasus ditemukannya masyarakat miskin tidak dapat menggunakan fasilitas BPJS dikarenakan adanya perbedaan data.

Keempat adalah meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk “membangun kembali dengan lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam menghadapi bencana tsunami, pembangunan shelter tsunami menjadi investasi yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan *shelter* tsunami di Kabupaten Pandeglang terhenti dikarenakan adanya korupsi dana pembangunan. Pencegahan bencana seperti pemantauan melalui sistem peringatan dini, latihan atau gladi kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk dibangun dan dikembangkan di Kabupaten Pandeglang. Kondisi saat ini sistem peringatan dini untuk

Tsunami Selat Sunda yang terpasang di wilayah Kecamatan Labuan dan Kecamatan Panimbang tidak berfungsi.

Pemulihan sosial dan ekonomi yang efektif akan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dikarenakan ketangguhan masyarakat akan terbentuk. Sosial dan ekonomi masyarakat yang kuat akan mendukung terciptanya prinsip *“build back better and safer”*, sehingga kehidupan masyarakat akan lebih baik dan aman dibandingkan sebelum bencana terjadi. Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan multisektoral yang telah direncanakan, dan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di suatu lingkup wilayah tertentu. Kabupaten Pandeglang sendiri mempunyai potensi pariwisata dan budaya yang cukup bagus sehingga dapat mendukung pembangunan daerah. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang tidak boleh hanya terfokus pada pembangunan pascabencana saja, akan tetapi harus menjadi pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan ekonomi tersebut akan berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kualitas kesehatan yang rendah, dan kesenjangan yang masih tinggi. Permasalahan ini juga nantinya akan menjadi efek domino terhadap aspek-aspek lain sehingga mengganggu tercapainya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang. Permasalahan ini juga akan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana seperti yang sudah disebutkan pada target pembangunan berkelanjutan.

Pemulihan sosial dan ekonomi di Kabupaten Pandeglang yang belum tercapai secara optimal akan menghambat 2 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada pilar pembangunan sosial, tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tidak akan tercapai jika tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan masih rendah. Pada bidang kesehatan sendiri, masyarakat Kabupaten Pandeglang tidak banyak yang mempunyai dan menggunakan fasilitas kesehatan gratis seperti BPJS. Selain itu, pelayanan kesehatan yang buruk membuat masyarakat lebih cenderung nyaman untuk berobat ke bidan-bidan dibandingkan ke Puskesmas atau rumah sakit. BPJS sendiri merupakan salah satu cara untuk mengurangi kerentanan sosial yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang. Dengan adanya BPJS, pengalihan kerentanan atau *risk transfer* dapat dilakukan sehingga masyarakat akan lebih tangguh menghadapi bencana di masa yang akan datang.

Pada pilar pembangunan ekonomi, tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan masih belum dapat

dilakukan. Prioritas pembangunan berkelanjutan dalam jangka waktu 2021-2026 yang dicanangkan oleh Kabupaten Pandeglang sendiri hingga saat ini masih banyak menghadapi kendala dan hambatan. Program prioritas pertama yang selaras dengan pemulihan sektor sosial dan ekonomi, yaitu memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi masih belum terpenuhi. Tindak pidana korupsi dana bantuan bencana yang kerap kali terjadi di Kabupaten Pandeglang juga menjadi hambatan dalam tercapainya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemulihan sosial dan ekonomi pada masyarakat terdampak bencana, pasca tsunami di kabupaten pandeglang untuk mendukung program pembangunan daerah berkelanjutan peneliti menarik beberapa kesimpulan. Pertama, tingkat pemulihan pada sektor sosial pada tahun 2021 secara keseluruhan dapat dikategorikan pulih, dengan indeks sebesar 100,08%. Berdasarkan indikator penilaian, kondisi sosial masyarakat saat ini secara nilai rata sudah pulih dan kondisi ekonomi masyarakat mendekati pulih, dengan program pemerintah pusat yang minim. Hal ini disebabkan oleh ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat untuk segera bangkit dari keterpurukan. Subsektor dengan proses pemulihan yang relatif lama adalah subsektor kelembagaan sosial dan sosial budaya. Masyarakat direlokasi pada hantap. Hal ini dalam pemulihannya berpotensi membutuhkan waktu yang agak lama, dikarenakan untuk menyamakan pemikiran, budaya, dan pemimpin baru. Terlebih jika mereka sangat fanatik terhadap pimpinannya, maka akan menyebabkan timbulnya ego dalam diri masing-masing.

Kedua, tingkat kepulihan sektor ekonomi pada tahun 2021 sebesar 99.59% dengan kategori belum pulih. Berdasarkan data tersebut, maka *build back better and safer* pada sektor ekonomi pada tahun 2021 dibandingkan dengan baseline tahun 2017 adalah -0,41% Hal ini juga dapat dilihat pada angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2021, yaitu sebesar 10,72%. Angka yang cukup tinggi ini juga diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini juga terlihat dari nilai PAD dan PDRB yang sempat meningkat pada tahun 2019, akan tetapi mengalami penurunan kembali karena adanya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Subsektor yang saat ini belum pulih dengan indeks rata-rata terendah yaitu pariwisata. Dikarenakan untuk pemulihan pada sektor pariwisata dibutuhkan kegiatan promosi-promosi yang menarik dibidang pariwisata secara terus menerus. Kurangnya berita pada masyarakat tentang kondisi terbaru saat ini, membuat para

wisatawan menjadi membatalkan rencana wisatanya. Pembangunan *shelter* tsunami pada daerah wisata dan jalur evakuasi dapat menambah kepercayaan diri wisatawan dikarenakan pada lokasi wisata sudah disiapkannya alat mitigasi ketika terjadi tsunami sehingga wisatawan merasa aman.

Ketiga, pemulihan sosial dan ekonomi yang efektif akan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dikarenakan ketangguhan masyarakat akan terbentuk. Sosial dan ekonomi masyarakat yang kuat akan mendukung terciptanya prinsip “*build back better and safer*”, sehingga kehidupan masyarakat akan lebih baik dan aman dibandingkan sebelum bencana terjadi. Kemiskinan, ketersediaan pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah masih menjadi permasalahan di Kabupaten Pandeglang dimana kabupaten ini merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Banten. Dengan adanya permasalahan-permasalahan ekonomi tersebut akan berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kualitas kesehatan yang rendah, dan kesenjangan yang masih tinggi sehingga mengganggu tercapainya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, K., Rahmat, H. K., Ramadhani, R. M., Najib, A., & Priambodo, A. (2020). Analisis Penanggulangan Bencana Alam dan Natech Guna Membangun Ketangguhan Bencana dan Masyarakat Berkelanjutan di Jepang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 361-374.
- Alexander, D. (2002). *Principles of Emergency Planning and Management*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Alimsuardi, M., Suprayogi, A., & Amarrohman, F. J. (2019). Analisis Kerusakan Tutupan Lahan Akibat Bencana Tsunami Selat Sunda Di Kawasan Pesisir Pantai Kecamatan Carita dan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Geodesi Undip*, 9(1), 146-155.
- Ardinata, R. P., Rahmat, H. K., Andres, F. S., & Waryono, W. (2022). Kepemimpinan transformasional sebagai solusi pengembangan konsep smart city menuju era society 5.0: sebuah kajian literatur [Transformational leadership as a solution for the development of the smart city concept in the society era: a literature review]. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 1(1).
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, O. A., Rahmat, H. K., Basri, A. S. H., Rajab, D. D. A., & Nurjannah, N. (2021). Urgensi Literasi Digital dalam Menangkal Radikalisme pada Generasi Millennial di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 126-133.

- BNPB. (2016). *Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. (2019). *Menyusun Indeks Pemulihan Pascabencana*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BPBD Kabupaten Pandeglang. (2021). *Dokumen RP3B Kabupaten Pandeglang*. Pandeglang: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang.
- BPS Kabupaten Pandeglang. (2020). *Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2020*. Pandeglang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*. United States of America: SAGE Publications Ltd.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis, a methods sourcebook*. USA: SAGE Publications.
- Priambodo, A., Widyaningrum, N., & Rahmat, H. K. (2020). Strategi Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. *PERSPEKTIF*, 9(2), 307-313.
- Putri, H. R., Metiadini, A., Rahmat, H. K., & Ukhsan, A. (2020). Urgensi pendidikan bela negara guna membangun sikap nasionalisme pada generasi millennial di Indonesia. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(2), 257-271.
- Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398-407.
- Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas dalam pengurangan risiko bencana. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 598-606.